

Evaluasi Tingkat Pelayanan Halte BISKITA Trans Bekasi Patriot di Kota Bekasi

Ibat Fais Alchikam^{1*}, Sandy Yoga Pratama^{2*}, Nadya Iffat Putri Ariska^{3*},
Caesario Boing Rachmat Raharjo^{4*}

^{1*} Sarjana Terapan Transportasi Darat, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD,
Kota Bekasi, Indonesia

^{2*} Sarjana Terapan Transportasi Darat, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD,
Kota Bekasi, Indonesia

^{3*} Sarjana Terapan Transportasi Darat, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD,
Kota Bekasi, Indonesia

^{4*} Sarjana Terapan Transportasi Darat, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD,
Kota Bekasi, Indonesia

^{1*}faisalchikam@gmail.com, ^{2*}sandyogap26@gmail.com,
^{3*}dyafattriska.putri@gmail.com, ^{4*}caesario.boing@ptdisttd.ac.id

Abstract

BISKITA Trans Bekasi Patriot is a Bus Rapid Transit (BRT) service in Bekasi City, part of Indonesia's national Buy The Service (BTS) program. Bus stops (halte) are critical touchpoints between passengers and the public transport system. This study evaluates the existing facility conditions of the BISKITA Trans Bekasi Patriot bus stop (Halte Bus Trans Patriot) against Minimum Service Standards (SPM) based on SK Dirjen Perhubungan Darat No. 271/HK.105/DRJD/96. Data were collected through field inventories, photographic documentation, and direct observation. Overall facility compliance with SPM was only 20%, with mandatory primary facilities at 33.3% compliance. Key deficiencies include absent route information boards, deteriorated lighting and seating, and complete absence of waste bins, safety fencing, and disability-accessible infrastructure. Strategic recommendations are provided for comprehensive renovation, digital information systems, and regular maintenance programs.

Keywords: Bekasi City; Bus Rapid Transit; Halte Evaluation; Minimum Service Standards; Public Transport.

Abstrak

BISKITA Trans Bekasi Patriot merupakan layanan *Bus Rapid Transit (BRT)* di Kota Bekasi sebagai bagian dari program *Buy The Service (BTS)* Kementerian Perhubungan RI. Halte berperan krusial sebagai titik interaksi pertama antara penumpang dan sistem transportasi publik. Penelitian ini mengevaluasi kondisi fasilitas eksisting Halte Bus Trans Patriot terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat No. 271/HK.105/DRJD/96. Data dikumpulkan melalui survei inventarisasi lapangan, dokumentasi foto, dan observasi langsung. Tingkat kesesuaian fasilitas terhadap SPM secara keseluruhan hanya 20%, dengan fasilitas utama wajib mencapai 33,3%. Defisiensi utama meliputi ketiadaan papan informasi trayek, kondisi lampu penerangan dan tempat duduk yang buruk, serta tidak tersedianya tempat sampah, pagar pembatas, dan fasilitas aksesibilitas difabel. Rekomendasi strategis diberikan untuk renovasi menyeluruh, pemasangan sistem informasi digital, dan program pemeliharaan rutin.

Article info

Received 15 Juni 2026

Revised 20 Juni 2026

Accepted 25 Juni 2026

faisalchikam@gmail.com

Copyright©2026. Published by Jurnal Prima Manajemen – Al -Afif

Kata Kunci: Kota Bekasi; *Bus Rapid Transit (BRT)*; Evaluasi Halte; Standar Pelayanan Minimum; Transportasi Publik.

1. PENDAHULUAN

Transportasi publik merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung mobilitas masyarakat perkotaan serta menunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Ketersediaan sistem transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan mudah diakses menjadi faktor penting dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Selain berperan sebagai sarana mobilitas, transportasi publik juga berkontribusi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas, menekan konsumsi energi, serta menurunkan emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan perkotaan modern (Vuchic, 2005).

Kota Bekasi merupakan salah satu kota penyangga utama Daerah Khusus Jakarta yang memiliki tingkat mobilitas penduduk sangat tinggi. Sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek, Kota Bekasi mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2024 telah mencapai lebih dari 2,6 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024). Pertumbuhan penduduk tersebut diikuti oleh meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat untuk bekerja, bersekolah, maupun melakukan aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volume lalu lintas di berbagai ruas jalan utama, seperti Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan KH. Noer Ali, Jalan Cut Meutia, dan Jalan Sultan Agung. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang belum diimbangi oleh optimalisasi penggunaan transportasi publik menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan yang masih sering terjadi di Kota Bekasi.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengembangkan program *Buy The Service (BTS)* di berbagai kota di Indonesia. Salah satu implementasi program tersebut adalah layanan BISKITA Trans Bekasi Patriot yang mulai beroperasi untuk melayani mobilitas masyarakat di Kota Bekasi. BISKITA (Bus Integrasi Siaga Kota) Trans Bekasi Patriot merupakan sistem *Bus Rapid Transit (BRT)* yang dirancang untuk memberikan pelayanan transportasi yang lebih aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi. Sistem *BRT* dipandang sebagai salah satu solusi transportasi perkotaan yang efektif karena mampu menyediakan layanan angkutan massal dengan kapasitas tinggi dan biaya operasional yang relatif lebih efisien dibandingkan moda transportasi berbasis rel (Vuchic, 2005).

Keberhasilan sistem *BRT* tidak hanya ditentukan oleh kualitas armada yang beroperasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur pendukung yang tersedia. Salah satu infrastruktur pendukung yang memiliki peran penting adalah halte. Dalam sistem transportasi publik, halte merupakan titik awal interaksi antara pengguna dengan layanan transportasi yang disediakan. Halte berfungsi sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, menyediakan informasi perjalanan, memberikan perlindungan terhadap kondisi cuaca, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna selama menunggu kedatangan kendaraan. Oleh karena itu, kualitas fasilitas halte menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan transportasi publik secara keseluruhan. Kualitas fasilitas pada titik pemberhentian transportasi publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pengguna mengenai kenyamanan, keamanan, dan kemudahan penggunaan layanan transportasi publik (Tirachini, 2020).

Dalam perspektif kualitas pelayanan, kondisi fasilitas halte dapat dianalisis melalui dimensi *tangible*, yaitu aspek yang berkaitan dengan bukti fisik layanan seperti bangunan,

peralatan, dan fasilitas pendukung yang dapat dirasakan secara langsung oleh pengguna (Parasuraman *et al.*, 1988). Dimensi *tangible* menekankan pentingnya bukti fisik layanan yang dapat dirasakan secara langsung oleh pengguna. Dalam konteks halte transportasi publik, dimensi tersebut meliputi ketersediaan papan nama halte, rambu petunjuk, papan informasi trayek, tempat duduk, lampu penerangan, kanopi pelindung, fasilitas kebersihan, serta fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan fasilitas tersebut berpengaruh terhadap kenyamanan, keselamatan, dan kepuasan pengguna dalam memanfaatkan layanan transportasi publik. Dengan demikian, evaluasi terhadap fasilitas halte menjadi penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Di Indonesia, standar fasilitas halte telah diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum. Regulasi tersebut mengatur berbagai fasilitas utama dan fasilitas tambahan yang harus tersedia pada halte guna menjamin kualitas pelayanan kepada pengguna. Fasilitas utama meliputi identitas halte, rambu petunjuk, papan informasi trayek, lampu penerangan, tempat duduk, dan kanopi pelindung. Sementara itu, fasilitas tambahan mencakup tempat sampah, pagar pembatas, telepon umum, dan papan pengumuman. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan halte karena mencerminkan tingkat kesiapan fasilitas dalam mendukung kebutuhan pengguna transportasi publik.

Hasil observasi awal yang dilakukan pada Halte BISKITA Trans Bekasi Patriot menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai fasilitas yang belum memenuhi standar pelayanan yang berlaku. Beberapa fasilitas utama seperti papan informasi trayek tidak tersedia, sedangkan fasilitas lain seperti tempat duduk, lampu penerangan, dan kanopi berada dalam kondisi kurang baik. Selain itu, sejumlah fasilitas tambahan seperti tempat sampah dan pagar pembatas juga belum tersedia. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kenyamanan, keamanan, dan kemudahan pengguna dalam mengakses layanan transportasi publik. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka tujuan pengembangan transportasi publik untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum dapat menjadi kurang optimal.

Penelitian mengenai kualitas fasilitas halte dan pelayanan transportasi publik telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas halte berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pengguna transportasi publik, sedangkan kualitas fasilitas pendukung pada sistem *Bus Rapid Transit (BRT)* berkontribusi terhadap efektivitas pelayanan transportasi publik. Selain itu, kualitas dan aksesibilitas halte juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan keterjangkauan layanan *BRT*. Kajian lain menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah fasilitas halte yang belum memenuhi standar pelayanan sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa fasilitas halte merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas pelayanan transportasi publik (Anwar *et al.*, 2025; Hardi & Murad, 2023; R. Saputra & Radam, 2022; Steven & Rifai, 2023).

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas aksesibilitas halte, kepuasan pengguna, dan kualitas layanan *BRT*, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada persepsi pengguna maupun analisis aksesibilitas jaringan transportasi. Penelitian yang secara khusus mengevaluasi kesesuaian fasilitas halte berdasarkan indikator teknis Standar Pelayanan Minimum (SPM) masih relatif terbatas. Selain itu, hingga saat ini belum banyak penelitian yang mengkaji kondisi fasilitas Halte BISKITA Trans Bekasi Patriot berdasarkan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait evaluasi fasilitas halte berbasis standar teknis yang berlaku pada layanan BISKITA Trans Bekasi Patriot.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan evaluatif berbasis Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk menilai tingkat kesesuaian fasilitas Halte BISKITA Trans Bekasi Patriot secara komprehensif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek persepsi pengguna dan aksesibilitas transportasi publik, penelitian ini berfokus pada evaluasi kondisi fisik halte berdasarkan indikator teknis yang ditetapkan pemerintah serta menghasilkan rekomendasi peningkatan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar pelayanan transportasi publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian fasilitas Halte BISKITA Trans Bekasi Patriot terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM), menganalisis kondisi eksisting fasilitas halte, serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan halte sebagai bagian dari sistem transportasi publik di Kota Bekasi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai evaluasi fasilitas transportasi publik berbasis standar pelayanan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Perhubungan, dan pengelola layanan BISKITA Trans Bekasi Patriot dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORI

Transportasi publik merupakan layanan angkutan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara massal dengan rute dan jadwal tertentu. Keberadaan transportasi publik berperan penting dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, meningkatkan efisiensi perjalanan, serta mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Sistem transportasi publik yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kualitas armada, tetapi juga oleh ketersediaan infrastruktur pendukung yang mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna (Cervero, 2018). Salah satu bentuk transportasi publik yang berkembang di berbagai kota adalah *Bus Rapid Transit (BRT)*. Sistem *BRT* merupakan layanan angkutan massal berbasis bus yang dirancang untuk memberikan pelayanan yang cepat, aman, nyaman, dan efisien. Karakteristik utama *BRT* meliputi jalur pelayanan yang terintegrasi, sistem tiket yang terorganisasi, halte yang memadai, serta informasi perjalanan yang mudah diakses pengguna. Dalam sistem *BRT*, halte menjadi salah satu komponen penting karena berfungsi sebagai titik interaksi antara penumpang dan layanan transportasi yang tersedia. Efektivitas sistem *BRT* sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur halte serta tingkat aksesibilitasnya terhadap pengguna, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas (H. Y. Saputra & Radam, 2022; Utari & Kusuma, 2021).

Kualitas pelayanan merupakan tingkat kemampuan suatu layanan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Kualitas pelayanan dapat diukur melalui lima dimensi utama, yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*. Dalam penelitian mengenai halte transportasi publik, dimensi *tangibles* menjadi aspek yang paling relevan karena berkaitan langsung dengan kondisi fisik fasilitas yang digunakan masyarakat. Dimensi *tangibles* mencakup kondisi bangunan, kelengkapan fasilitas, kebersihan lingkungan, kenyamanan ruang tunggu, pencahayaan, papan informasi, serta aksesibilitas bagi seluruh pengguna. Kualitas fasilitas fisik yang baik akan meningkatkan kenyamanan pengguna serta membentuk persepsi positif terhadap pelayanan transportasi publik. Sebaliknya, fasilitas yang rusak atau tidak lengkap dapat menurunkan tingkat kepuasan dan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Kualitas fasilitas halte memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalaman perjalanan pengguna transportasi publik. Halte yang aman, nyaman, dan informatif mampu meningkatkan daya tarik layanan transportasi umum sehingga mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi menuju angkutan massa (Tirachini, 2020).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96, halte merupakan tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang dilengkapi bangunan tertentu. Dalam sistem transportasi modern, fungsi halte tidak hanya sebagai tempat menunggu kendaraan, tetapi juga sebagai pusat informasi perjalanan, titik integrasi antarmoda, serta sarana pendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna. Keberadaan halte yang memadai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan transportasi secara keseluruhan. Halte yang dilengkapi fasilitas yang baik mampu memberikan perlindungan terhadap cuaca, memudahkan akses informasi rute perjalanan, meningkatkan keamanan pengguna, dan mendukung aksesibilitas bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Kualitas halte menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan transportasi publik karena merupakan fasilitas yang berinteraksi langsung dengan pengguna pada tahap awal dan akhir perjalanan (Tirachini, 2020).

Penyelenggaraan halte sebagai bagian dari sistem transportasi publik di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi. Dasar hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Selain itu, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96 menjadi pedoman teknis utama dalam penyediaan tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum (TPKPU). Regulasi tersebut mengatur persyaratan lokasi, dimensi, serta fasilitas yang harus tersedia pada halte. Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan ukuran minimal mutu pelayanan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara transportasi publik. Pemenuhan SPM halte menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan transportasi karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kemudahan pengguna dalam mengakses layanan transportasi publik.

Berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96, fasilitas halte dibedakan menjadi fasilitas utama dan fasilitas tambahan. Fasilitas utama meliputi identitas halte, rambu petunjuk, papan informasi trayek, lampu penerangan, tempat duduk, dan kanopi pelindung. Fasilitas tersebut bersifat wajib karena secara langsung mendukung fungsi pelayanan kepada pengguna. Sementara itu, fasilitas tambahan meliputi tempat sampah, pagar pembatas, papan pengumuman, dan fasilitas pendukung lainnya yang berfungsi meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna. Ketersediaan fasilitas tersebut menjadi salah satu indikator dalam menilai tingkat pemenuhan standar pelayanan halte. Selain kelengkapan fasilitas, aspek dimensi halte juga menjadi perhatian penting. Regulasi menetapkan bahwa ukuran halte harus disesuaikan dengan jumlah penumpang, jumlah kendaraan yang berhenti, serta karakteristik tata guna lahan di sekitarnya. Ruang gerak minimal per penumpang adalah 90 cm × 60 cm dengan ukuran halte minimal 4 m × 2 m pada kondisi normal.

Penelitian mengenai kualitas halte dan fasilitas transportasi publik telah dilakukan oleh berbagai peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Aksesibilitas halte berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pengguna transportasi publik di Kota Batam (Steven & Rifai, 2023). Kualitas fasilitas pendukung pada sistem *BRT* berkontribusi terhadap efektivitas pelayanan transportasi publik di Jakarta (Hardi & Murad, 2023). Kualitas lokasi dan aksesibilitas halte berperan penting dalam meningkatkan keterjangkauan layanan *BRT* (H. Y. Saputra & Radam, 2022). Sebagian fasilitas halte Trans Jatim belum memenuhi standar pelayanan sehingga diperlukan evaluasi secara berkala (Anwar *et al.*, 2025). Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang lebih banyak menekankan aspek aksesibilitas dan kepuasan pengguna, penelitian ini berfokus pada evaluasi kesesuaian

fasilitas halte terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) berdasarkan indikator teknis yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian ini menempatkan kualitas pelayanan halte sebagai manifestasi dari dimensi tangible dalam teori kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan diukur melalui tingkat kesesuaian fasilitas halte terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Semakin tinggi tingkat pemenuhan fasilitas sesuai standar, semakin baik kualitas pelayanan halte yang diberikan kepada pengguna. Berdasarkan posisi teoretis tersebut, evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting fasilitas Halte BISKITA Trans Bekasi Patriot dengan indikator fasilitas yang dipersyaratkan dalam SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan fasilitas serta merumuskan rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan halte.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode evaluatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menilai tingkat kesesuaian fasilitas Halte BISKITA Trans Bekasi Patriot terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96. Metode evaluatif digunakan untuk membandingkan kondisi aktual objek penelitian dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian dan kebutuhan perbaikannya (Arikunto & Jabar, 2018; Sugiyono, 2022).

Penelitian dilakukan pada Halte BISKITA Trans Bekasi Patriot yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tepatnya di sekitar Stadion Patriot Candrabhaga. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu halte yang melayani koridor utama BISKITA Trans Bekasi Patriot. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei inventarisasi fasilitas halte, observasi lapangan, dokumentasi foto, dan wawancara dengan pengguna maupun pengelola halte. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi, BPS Kota Bekasi, Kementerian Perhubungan, serta berbagai regulasi dan dokumen pendukung yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (1) analisis kondisi eksisting fasilitas halte; (2) analisis kesesuaian fasilitas terhadap SPM menggunakan matriks perbandingan; (3) analisis tingkat kelengkapan fasilitas melalui perhitungan persentase pemenuhan standar; dan (4) penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan teknis yang berlaku. Persentase pemenuhan dihitung dengan membandingkan jumlah fasilitas yang sesuai standar terhadap jumlah fasilitas yang dipersyaratkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan pada penelitian ini disusun berdasarkan data hasil observasi lapangan, inventarisasi fasilitas halte, dokumentasi, serta wawancara yang dilakukan pada Halte BISKITA Trans Bekasi Patriot. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting halte terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum. Pembahasan difokuskan pada kondisi eksisting fasilitas halte, tingkat kesesuaian fasilitas terhadap standar yang berlaku, serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan halte sebagai bagian dari sistem transportasi publik di Kota Bekasi.

4.1 Kondisi Eksisting Halte BISKITA Trans Bekasi Patriot

Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan, Halte Bus Trans Patriot memiliki ukuran panjang 3 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 2,8 meter. Struktur menggunakan konstruksi

beton dan besi dengan atap pelindung (kanopi). Keseluruhan halte dicat hijau yang kini terlihat pudar dan kusam. Terdapat tanda-tanda kerusakan: cat mengelupas, komponen besi berkarat, dan papan informasi tidak terbaca. Dimensi halte juga tergolong kecil untuk kapasitas jam-jam sibuk. Belum tersedia jalur difabel yang memadai.



Gambar 4.1 Peta Rute BISKITA Trans Patriot
Sumber: (Dinas Perhubungan Kota Bekasi, 2023)



Gambar 4.2 Kondisi Eksisting Halte Bus Trans Patriot
Sumber: (Survei Lapangan, 2026)

Tabel 4.1 Standar Fasilitas Halte Berdasarkan SPM

No	Jenis Fasilitas	Kategori	Keterangan
1	Identitas Halte (Nama/Nomor)	Utama (Wajib)	Papan nama dengan tulisan jelas dan terbaca
2	Rambu Petunjuk	Utama (Wajib)	Petunjuk arah dan informasi rute
3	Papan Informasi Trayek	Utama (Wajib)	Informasi rute, tujuan, dan jadwal
4	Lampu Penerangan	Utama (Wajib)	Penerangan yang cukup untuk keamanan
5	Tempat Duduk	Utama (Wajib)	Tersedia untuk calon penumpang
6	Kanopi/Atap Pelindung	Utama (Wajib)	Pelindung dari hujan dan sinar matahari
7	Telepon Umum	Tambahan	Disediakan bila diperlukan
8	Tempat Sampah	Tambahan	Mendukung kebersihan lingkungan
9	Pagar Pembatas	Tambahan	Keamanan dan keteraturan penumpang
10	Papan Iklan/Pengumuman	Tambahan	Informasi publik tambahan

Sumber: (SK Dirjen Perhubungan Darat No. 271/HK.105/DRJD/96, 2026)

4.1.1 Hasil Inventarisasi Fasilitas Halte

Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan pada tahun 2026, berikut adalah hasil inventarisasi fasilitas Halte BISKITA Trans Patriot Bekasi:

Tabel 4.2 Hasil Inventarisasi Fasilitas Halte BISKITA Trans Patriot Bekasi

No	Nama Halte	Lokasi	Jenis Fasilitas	Ketersediaan	Kondisi
1	Halte BISKITA Trans Bekasi Patriot (Stadion Patriot Candrabhaga)	Jl. Jend. Ahmad Yani, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Papan Nama/Identitas Halte	Ada	Baik
2			Rambu Petunjuk	Ada	Baik
3			Papan Informasi Trayek	Tidak Ada	-
4			Lampu Penerangan	Ada	Buruk
5			Tempat Duduk	Ada	Buruk
6			Kanopi/Atap	Ada	Buruk
7			Telepon Umum	Tidak Ada	-
8			Tempat Sampah	Tidak Ada	-
9			Pagar Pembatas	Tidak Ada	-
10			Papan Pengumuman	Ada	Buruk

Sumber: (Hasil Survei Lapangan, 2026)

4.1.2 Analisis Kesesuaian Fasilitas dengan SPM

Analisis kesesuaian dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting terhadap standar SK Dirjen No. 271/HK.105/DRJD/96. Hasil analisis disajikan dalam matriks kesesuaian berikut:

Tabel 4.3 Matriks Kesesuaian Fasilitas Halte dengan SPM

No	Jenis Fasilitas	Kategori SPM	Standar SPM	Kondisi Eksisting	Status	Keterangan
1	Papan Nama/Identitas Halte	Utama	Ada, Terbaca	Ada, Baik	✓ Sesuai	Memenuhi standar
2	Rambu Petunjuk	Utama	Ada	Ada, Baik	✓ Sesuai	Memenuhi standar
3	Papan Informasi Trayek	Utama	Ada	Tidak Ada	✗ Tidak Sesuai	Perlu penambahan
4	Lampu Penerangan	Utama	Ada, Berfungsi	Ada, Buruk	△ Kurang Sesuai	Perlu perbaikan
5	Tempat Duduk	Utama	Ada, Layak	Ada, Buruk	△ Kurang Sesuai	Perlu renovasi
6	Kanopi/Atap Pelindung	Utama	Ada, Layak	Ada, Buruk	△ Kurang Sesuai	Perlu renovasi
7	Telepon Umum	Tambahan	Opsional	Tidak Ada	— Opsional	Dapat ditambahkan
8	Tempat Sampah	Tambahan	Opsional	Tidak Ada	△ Perlu Ada	Disarankan ada
9	Pagar Pembatas	Tambahan	Opsional	Tidak Ada	△ Perlu Ada	Disarankan ada
10	Papan Pengumuman	Tambahan	Opsional	Ada, Buruk	△ Perlu Perbaikan	

Sumber: (Hasil Analisis, 2026)

4.1.3 Penilaian Tingkat Kelengkapan Fasilitas

Berdasarkan analisis kesesuaian, dilakukan penilaian terhadap fasilitas utama (wajib) dan fasilitas tambahan. Dari 6 item fasilitas utama: 2 item Sesuai SPM, 3 item Kurang Sesuai/kondisi buruk, dan 1 item Tidak Ada.

Tabel 4.4 Penilaian Tingkat Kelengkapan Fasilitas Utama

No	Fasilitas Utama	Ketersediaan	Kondisi	Penilaian
1	Papan Nama/Identitas Halte	Ada	Baik	Sesuai SPM
2	Rambu Petunjuk	Ada	Baik	Sesuai SPM
3	Papan Informasi Trayek	Tidak Ada	-	Tidak Memenuhi
4	Lampu Penerangan	Ada	Buruk	Perlu Perbaikan
5	Tempat Duduk	Ada	Buruk	Perlu Perbaikan
6	Kanopi/Atap Pelindung	Ada	Buruk	Perlu Perbaikan

Sumber: (Hasil Analisis, 2026)

Untuk fasilitas tambahan: dari 4 item, tidak ada yang sesuai SPM. Telepon umum tidak ada; tempat sampah tidak ada; pagar pembatas tidak ada; papan pengumuman ada namun kondisi buruk.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Fasilitas

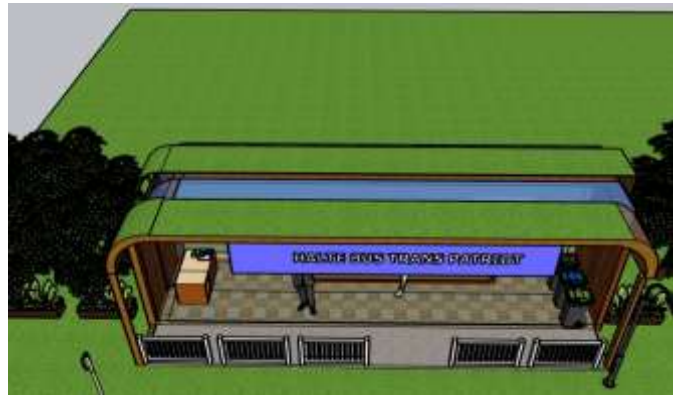
No	Kategori Fasilitas	Total Item	Sesuai SPM	Tidak/ Kurang	% Pemenuhan
1	Fasilitas Utama (Wajib)	6	2	4	33,3%
2	Fasilitas Tambahan	4	0	4	0%
TOTAL		10	2	8	20%

Sumber: (Hasil Analisis, 2026)

Tingkat pemenuhan fasilitas utama hanya 33,3% dan fasilitas tambahan 0%. Secara keseluruhan persentase pemenuhan terhadap SPM hanya 20%. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pengelola, karena rendahnya pemenuhan SPM berdampak langsung pada kenyamanan dan minat masyarakat menggunakan transportasi publik.

4.2 Desain Usulan Halte

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting dan evaluasi SPM, penulis merumuskan desain usulan peningkatan fasilitas Halte BISKITA Trans Bekasi Patriot. Konsep desain mengadopsi pendekatan modern dengan material tahan lama, menggabungkan material baja, kayu, dan kaca untuk tampilan estetik namun fungsional, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas dan keberlanjutan.



Gambar 4.3 Usulan Desain Kanopi Halte – Tampak Perspektif Atas
Sumber: (Penulis, 2026)



Gambar 4.4 Usulan Desain Lampu Penerangan Halte – Tampak Perspektif Samping
Sumber: (Penulis, 2026)



Gambar 4.5 Usulan Desain Papan Nama Halte – Tampak Depan
Sumber: (Penulis, 2026)

Elemen desain usulan mencakup: (1) kanopi lengkung berangka baja, material transparan, lebar minimal 3 meter; (2) sistem pencahayaan LED hemat energi, iluminasi minimal 100 lux; (3) papan nama prominan dan papan informasi trayek anti-UV; (4) tempat duduk ergonomis minimal 8 orang; (5) pagar pembatas setinggi 90 cm; (6) tempat sampah tahan cuaca di kedua sisi; dan (7) aksesibilitas difabel lengkap: ramp, guiding block, dan handrail.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Halte Bus Trans Patriot, tingkat kesesuaian fasilitas halte terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96 masih tergolong rendah. Dari 10 fasilitas yang dievaluasi, hanya 2 fasilitas, yaitu papan nama halte dan rambu petunjuk, yang telah memenuhi standar sehingga tingkat pemenuhan fasilitas secara keseluruhan hanya mencapai 20%. Pada kelompok fasilitas utama yang bersifat wajib, tingkat kesesuaian mencapai 33,3%, sedangkan fasilitas tambahan tidak menunjukkan pemenuhan standar karena sebagian besar tidak tersedia atau berada dalam kondisi yang kurang layak. Beberapa fasilitas penting, seperti papan informasi trayek, tidak tersedia sama sekali, sementara lampu penerangan, tempat duduk, dan kanopi telah tersedia namun kondisinya kurang baik dan belum mampu mendukung kenyamanan pengguna secara optimal. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas halte melalui renovasi fasilitas yang ada, penyediaan papan informasi trayek dan sistem informasi digital *real-time*, perbaikan lampu penerangan, penambahan tempat sampah dan pagar pembatas, peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta pelaksanaan program pemeliharaan secara rutin dan berkala. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan halte sehingga mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna transportasi publik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya mengevaluasi aspek fisik fasilitas halte, tetapi juga mengkaji tingkat kepuasan pengguna, aksesibilitas layanan, dan pengaruh kualitas halte terhadap minat masyarakat menggunakan transportasi publik sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas pelayanan BISKITA Trans Bekasi Patriot.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H. F. L., Adibah, A. N., & Amal, A. S. (2025). Evaluation of Trans Jatim Bus Stop Facilities Based on Service Standards. *Jurnal Pensil*. <https://doi.org/10.21009/jpensil.v15i1.62767>
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. (2018). *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2024). *Kota Bekasi Dalam Angka 2024*.

- Cervero, R. (2018). Transit-Oriented Development and Joint Development in the United States: A Historical Review. *Journal of Planning Literature*, 33(1), 7–17. <https://doi.org/10.1177/0885412217728245>
- Hardi, A. Z., & Murad, A. A. (2023). Spatial Analysis of Accessibility for Public Transportation, A Case Study in Jakarta, *Bus Rapid Transit System* (Transjakarta), Indonesia. *Journal of Computer Science*, 19(10), 1190–1202. <https://doi.org/10.3844/jcssp.2023.1190.1202>
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40. [https://doi.org/10.1016/0022-4359\(88\)90035-5](https://doi.org/10.1016/0022-4359(88)90035-5)
- Saputra, H. Y., & Radam, I. F. (2022). Accessibility model of *BRT* stop locations using Geographically Weighted Regression: A case study in Banjarmasin, Indonesia. *International Journal of Transportation Science and Technology*, 12(3), 779–792. <https://doi.org/10.1016/j.ijtst.2022.07.002>
- Saputra, R., & Radam, R. (2022). Accessibility and Public Transport Coverage in *BRT* Systems. *Journal of Transportation Studies*.
- Steven, & Rifai, A. I. (2023). Satisfaction analysis of bus stop accessibility: A case study of Batam Center. *LEADER: Civil Engineering and Architecture Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.37253/leader.v1i1.8074>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D*. Alfabeta.
- Tirachini, A. (2020). Public transport systems and user experience. *Transportation Research*.
- Utari, Z. M., & Kusuma, N. R. (2021). Accessibility for Persons with Mobility Impairment at Bus Stops. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 673, 12049. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/673/1/012049>
- Vuchic, V. R. (2005). *Urban Transit Systems and Technology*. John Wiley & Sons.